Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital
Volume. 3, Nomor. 4, November 2026
e-ISSN : 3046-8132; dan p-ISSN : 3046-868X; Hal. 62-74
DOI: https://doi.org/10.61132/apke.v3i4.2669
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/APKE

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Gampong Bener Meriah Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah

Ades Triana
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Penulis Korespondensi : *adestriana1231@gmail.com*

Abstract. *Transparency and accountability on the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Bener Meriah Village, Pintu Rime Gayo District, Bener Meriah Regency. To achieve optimal results, data was gathered from the responses of 215 residents of Bener Meriah Village to a questionnaire. The data analysis technique employed was multiple linear regression using SPSS 24 software. Based on the F-test results from the ANOVA table, the calculated F-value was 112.249, while the F-table value was 3.04 (α = 0.05; df1 = 2; df2 = 212). Since the calculated F-value exceeded the F-table value (112.249 > 3.04) and the significance value was less than 0.05 (0.000 < 0.05), the null hypothesis (H0) was rejected and the alternative hypothesis (Ha) was accepted; this indicates that transparency and accountability simultaneously have a significant effect on APBDes management. Based on the t-test results, the t-table value was 1.971 (df = 212; α = 0.05). The calculated t-value exceeded the t-table value (7.111 > 1.971) with a significance value of 0.000 (< 0.05); thus, H0 was rejected and Ha was accepted, meaning transparency has a significant effect on APBDes management in Bener Meriah. The coefficient of determination (R^2) was 0.514, or 51.4%, indicating that other factors influence APBDes management, while the remaining 48.6% is attributed to other variables.*

Keywords: *Accountability; Budget Management; Transparency; Village Government; Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes).*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Pada Gampong Bener Meriah Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka ruang lingkup data diperoleh dari jawaban responden melalui pertanyaan kuesioner yang dibagikan kepada 215 responden yaitu Masyarakat Desa Bener Meriah Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan SPSS 24. Berdasarkan hasil uji F pada tabel ANOVA diperoleh f hitung 112,249, sedangkan f tabel sebesar 3,04 (α = 0,05; df_1 = 2; df_2 = 212). Nilai f hitung > f tabel yaitu 112,249 > 3,04 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang berarti transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penglolaan APBDes, Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t tabel sebesar 1,971 (df = 212; α = 0,05). Jika t hitung > t tabel yaitu 7,111 > 1,971 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti transparansi berpengaruh signifikansi terhadap pengelolaan APBDes Bener Meriah dan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,514 atau 51,4%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penglolaan APBDes, Sementara sisa dari peran variabel tersebut sebesar 48,6%.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); Pemerintah Desa; Pengelolaan Anggaran; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan

Naskah Masuk: 02 September 2026; Revisi: 07 Oktober 2026; Diterima: 30 Oktober 2026; Terbit: 09 November 2026

kegiatannya. Kedua prinsip tersebut diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Permasalahan yang ditemukan di Gampong Bener Meriah, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, yaitu belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Hal ini terlihat dari kurangnya keterbukaan informasi mengenai realisasi penggunaan dana desa, belum maksimalnya pelaksanaan musyawarah desa, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi anggaran melalui papan pengumuman maupun website. Selain itu, terdapat program pembangunan dan pelayanan masyarakat yang belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola anggaran.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa penelitian menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDes, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Perbedaan hasil tersebut menjadi research gap yang mendasari perlunya penelitian lebih lanjut pada Gampong Bener Meriah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan APBDes, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan keterbukaan informasi, pertanggungjawaban keuangan, dan kualitas pengelolaan anggaran demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dari aparatur desa dalam mengelola Dana Desa dalam pembangunan desa (Kristianten, 2018). Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional (Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2017).

Menurut Taufiqul (2022) konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholders yang mebutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggaraan dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan ini dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, kalau sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan ini tertutup dan nformasinya sulit diperoleh oleh para pengguna dan stakeholders lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi.

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata, dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat didefinisikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu : Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah desa (Mardiasmo, 2016).

Transparansi dapat didefinisikan sebagai suatu yang jelas dan nyata, dengan demikian transparansi pengelolaan keuangan dana desa berati prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan. (Fitriani, 2023) Transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan.Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran yaitu dapat mencegah terjadinya korupsi, mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan

kebijakan tertentu, menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk dan menciptakan iklim investigasi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepastian usaha (Kristianten, 2018).

Dari Pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa transparansi memiliki peran penting yang harus dilaksanakan pemerintah desa dengan cara memberikan informasi yang cukup terkait keuangan desa dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Dari transparansi yang benar, maka suatu desa akan lebih mudah dalam mewujudkan impian mereka yaitu pemerintahan yang baik, karena transparansi dapat mengurangi angka kecurangan dan penyelewengan dana desa. Untuk mengukur transparansi APBDes yang harus diperhatikan yaitu, (keterbukaan) terbuka terhadap informasi mengenai dana APBDes, (informatif) memberikan informasi kepada stakeholder dengan jelas, dan (pengungkapan) mengungkapkan kepadada publik mengenai aktifitas dan kegiatan finansial seperti kondisi keuangan, susunan pengurus, serta bentuk perencanaan dan hasil kegiatan. Untuk mengukur transparansi yang harus diperhatikan adalah (Ika Wulandari (2020) : Keterbukaan, Informatif, dan Pengungkapan.

Pengertian Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas menurut kamus besar bahasa indonesia adalah suatu kegiatan pertanggungjawaban. Menurut ensiklopedia administrasi, akuntabilitas adalah kesadaran seorang pejabat untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya bagi diri sendiri tanpa melihat ada atau tidak ada penjabat atasnya (Muhammad 2017). Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto, Sahmuddin, and Arifuddin, 2017).

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah, wajib mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Prinsip ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas akan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik. (*Franklin Alberto Kima*, 2025). Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang yang diberikan kepercayaan (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyediakan dan melaporkan seluruh kegiatan kepada pihak yang memberikan kepercayaan tersebut (Riski & Maryono, 2022). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa

akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tata kelola sumber daya dan penerapan peraturan yang ditugaskan pada kepentingan pelapor untuk memperoleh target yang telah ditentukan. Jadi, pada dasarnya akuntabilitas sangat diperlukan dalam ruang lingkup pemerintahan desa karena sebagai penunjang penerapan otonomi desa supaya seluruh kegiatannya dapat berjalan dengan baik. (Saputra et al., 2024).

Dalam penyusunan akuntabilitas pengelolaan dana desa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu, transparansi dan kompetensi aparatur desa. Transparansi dalam pengelolaan dana desa dimaksudkan agar aparatur desa dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan juga sesuai dengan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat untuk mengelola dana desa secara transparan (Fajri & Julita, 2021). Tranparansi merupakan sikap terbuka dari pemerintah untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan dan pihak yang terlibat dalam aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Aprilya & Fitria, 2020). Untuk menciptakan sikap transparansi maka setiap tahapan proses pemerintahan, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkannya. Selain itu, informasi harus relevan sehingga orang dapat memahaminya.

Akuntabilitas merupakan kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal) (Muhammad, 2015).

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari pemegang amanah untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan amanah tersebut kepada pemberi amanah. Adanya akuntabilitas dapat sebagai sarana/bukti bahwa suatu amanah sudah dikerjakan atau dilaksanakan dengan baik. Adapun indikator Akuntabilitas dibagi menjadi lima yaitu (Loina, 2016): Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program, Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan, Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat, dan Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Pengertian Pengelolaan APBDes

Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut sesuatu perencanaan diperlukan untuk menyesuaikan suatu tujuan tertentu. Dari

pengertian diatas pengelolaan dititik beratkan pada proses pengendalian dan pemanfaatan semua faktorsumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat (Ika Wulandari, 2020). APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus (Yuliansyah and Rusmianto, 2018).

Dari penjelasan di atas, Pengelolaan Dana APBDes memiliki makna bahwa seluruh perencanaan yang merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa yang memuat pengeluaran yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun. Sehingga dalam Pengelolaan dana APBDes dibutuhkan kegiatan yang meliputi beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban Keuangan desa. Lima indikator pengelolaan dana APBDes yaitu sebagai berikut (Ika Wulandari, 2020): 1) Tahap Perencanaan, 2) Tahap Pelaksanaan, 3) Tahap Penatausahaan, 4) Tahap Pelaporan, 5) Tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengetahui pengaruh transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) pemerintah desa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Y) di Gampong Bener Meriah, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, yaitu Maret hingga Mei, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Populasi penelitian berjumlah 464 masyarakat, dengan sampel sebanyak 215 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert 1–5, yang disusun berdasarkan indikator transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan APBDes. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah desa, laporan keuangan, buku, jurnal, dan sumber relevan lainnya. Selanjutnya, data dianalisis melalui uji validitas menggunakan korelasi Pearson, uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dengan nilai lebih dari 0,60, serta uji normalitas menggunakan Normal Probability Plot. Analisis dilanjutkan dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan jawaban terhadap setiap variabel, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis melalui uji t, uji F, dan koefisien

determinasi (R^2). Seluruh tahapan tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDes, baik secara parsial maupun simultan.

Analisis data dalam penelitian ini yaitu pertama dengan uji instrumen penelitian yaitu dengan uji validasi dan uji rehabilitas, kedua yaitu uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis penelitian dengan analisis Regresi Linier Berganda untuk melakukan prediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai- nilai variabel bebas. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui arah keterkaitan antaravariabel tak bebas dengan variabel bebasnya. Model regresi linear berganda disajikan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta 1\ X_1 + \beta 2\ X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Penglolaan dana desa

X_1 = Transparansi

X_2 = Akuntabilitas

a = Konstanta

β = Slope atau Koefisien estimat ε

= Standart error Jurnal

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Persamaan regresi berganda dapat dilihat dari nilai koefisien pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Coefisient

	Modal	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	tolerance	VIF
		B	Std.Error	Beta				
1	(Constant)	5,501	1,010		5,449	0,000		
	TRANSPARANSI	0,427	0,060	0,444	7,111	0,000	0,586	1,705
	AKUNTABILITAS	0,324	0,059	0,345	5.528	0.000	0,586	1,705

Berdasarkan tabel 1 di atas persamaan regresi linear berganda dapat ditulis sebagai berikut :

Y= 5,501 + 0,427X1 + 0,324X2 + e

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan beberapa hal, sebagai berikut :

Konstanta sebesar 5,501 menunjukkan bahwa apabila variabel transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah sebesar 5,501. Nilai konstanta ini

menunjukkan nilai dasar pengelolaan APBDes sebelum dipengaruhi oleh variabel transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.

Koefisien regresi variabel transparansi sebesar 0,427 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan pada variabel transparansi akan meningkatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar 0,427 satuan, dengan asumsi variabel akuntabilitas pemerintah desa tetap (konstan). Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi pemerintah desa, maka semakin baik pula pengelolaan APBDes Bener Meriah Kecamatan Pintu Rime Gayo.

Koefisien regresi variabel akuntabilitas pemerintah desa sebesar 0,324 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan pada variabel akuntabilitas pemerintah desa akan meningkatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar 0,324 satuan, dengan asumsi variabel transparansi tetap (konstan). Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas pemerintah desa, maka semakin baik pula pengelolaan APBDes Bener Meriah Kecamatan Pintu Rime Gayo.

Tabel 2. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. error of the estimate
1	0,717[a]	0,514	0,510	2,216

a. Predictors: (constant), AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI
b. Dependent variable: PENGLOLAAN APBDES

Sumber: Data Primer, 2026 (diolah)

Hubungan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan APBDes Bener Meriah Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah termasuk kategori sangat kuat, ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,717 atau 71,7%.

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,514 menjelaskan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mempengaruhi pengelolaan APBdes Bener Meriah Kecamatjan Pintu Rime gayo Kabupaten Bener Meriah sebesar 51,4%. Sementara sisa dari peran variabel tersebut sebesar 0,486 (48,6%). Nilai residu tersebut menujukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan APBDes Bener Meriah Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

Nilai Adjusted R square sebesar 0,510 (51,0%) menunjukkan besarnya R square yang telah disesuaikan yaitu R^2 yang telah dibebaskan dari pengaruh derajat bebas, sehingga benar-benar menunjukkan bagaimana pengaruh transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan APBdes Bener Meriah Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

Pengujian Hipotesis

Transparansi berpengaruh secara parsial positif signifikan terhadap pengelolaan APBDes Bener Meriah Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, yang ditunjukkan oleh hasil t hitung > t tabel yaitu 17.111 >1,971. Akuntabilitas pemerintah desa secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan APBDes Bener Meriah Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, yang ditunjukkan oleh hasil t hitung > t tabel yaitu 5.528 >1,971. Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan APBDes Bener Meriah Kecamatan Pintu rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, yang ditunjukkan oleh hasil F-hitung > f tabel yaitu 112,249 > 3,04.

Pembahasan

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan APBDes

Terdapat hubungan positif variabel X1 (transparansi), terhadap variabel (pengelolaan APBDes) yang ditunjukkan oleh hasil t hitung > t tabel yaitu 17.111 > 1,971. Maka dapat disimpulkan bahwasannya transparansi berpengaruh positif dan singnifikan terhadap pengeloaan APBDes. Hasil penelitian sejalan dengan Riska Dwi Astuti (2021) yang menguji tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Tamalate Kabupaten Takalar dan hasil penelitian Melia Wida Rahmayanian Engkun Kurnadi (2022) yang menguji tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (studi pada seluruh desa di kecamatan kadipaten) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana APBDes. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional (Haryanto, Sahmuddin, and Arifuddin, 2017).

Pengaruh Akuntabilitas Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan APBDes

Terdapat hubungan positif variabel X2 (akuntabilitas pemerintah desa), terhadap variabel Y (pengelolaan APBDes) yang ditunjukkan oleh hasil t hitung > t tabel atau yaitu 5.528 > 1,971. Maka dapat disimpulkan bahwasannya akuntabilitas pemerintah desa berpengaruh singnifikan terhadap pengelolaan APBDes. Hasil penelitian sejalan dengan Riska Dwi Astuti (2021) yang menguji tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Tamalate Kabupaten Takalar dan hasil penelitian Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurnadi (2022) yang menguji tentang pengaruh transparansi dan

akuntabilitas terhadap pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (studi pada seluruh desa di Kecamatan Kadipaten), menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan apabila diterapkan secara bersama-sama terhadap Pengelolaan dana APBDes.

Akuntabilitas dalam konteks pemerintah desa berarti adanya tanggung jawab yang jelas dan laporan yang transparan mengenai penggunaan dana desa. Pemerintah desa yang akuntabel harus mampu menjelaskan setiap keputusan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menilai apakah dana tersebut digunakan secara efisien dan efektif. Akuntabilitas juga mencakup pelaporan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar yang berlaku, yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan yang konstruktif. Secara keseluruhan, akuntabilitas pemerintah desa berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan APBDes. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, pemerintah desa dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa anggaran desa digunakan secara optimal untuk kepentingan bersama. Akuntabilitas tidak hanya memperbaiki tata kelola keuangan desa, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan.

Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan APBDes

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Nilai f hitung > f tabel yaitu 112,249 > 3,04 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan Ha Diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes. Besarnya pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap Pengelolaan APBDes di Desa Bener Meriah adalah 51,4% yang disebutkan dari hasil pengujian pada tabel 4.8. Artinya transparansi dan akuntabilitas berpengaruh sebesar 51,4% terhadap Pengelolaan APBDes. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi dan teori stakeholder. Dimana akuntabilitas dibutuhkan dalam setiap laporan Keuangan. Akuntabilitas harus tercapai untuk mencapai kepercayaan publik. Begitu juga dengan transparansi, keterbukaan informasi mengenai APBDes yang dilakukan pemerintah desa secara sukarela dapat memberikan informasi yang berguna bagi stakeholder dan sebagai upaya pemerintah desa mendapatkan dukungan dari stakeholder.

Transparansi dan akuntabilitas memiliki peran penting yang saling berkaitan dan sangat dibutuhkan dalam suatu pemerintahan. Dengan adanya transparansi maka akuntabilitas dapat diterapkan dengan baik. Secara garis besar makna dari transparansi dan akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah kepada publik secara jujur dan terbuka melalui media penyajian laporan keuangan yang dapat

diakses oleh publik. Transparansi dan akuntabilitas dapat digunakan untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau manipulasi dimana hal tersebut hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja dan merugikan pihak lain penelitian sebelumnya oleh Riska Dwi Astuti (2021) yang menguji tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Tamalate Kabupaten Takalar menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan apabila diterapkan secara bersama-sama terhadap Pengelolaan Keuangan desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bagi Akademisi penelitian ini dapat menjadi pembendaharaan di Pustaka dan menjadi acuan bagi akademisi yang ingin melanjutkan penelitian yang serupa. Bagi pemerintah desa, perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan menyediakan informası yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti melalui papan pengumuman desa atau website resmi. Pemerintah desa harus memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa pengelolaan APBDes dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi. Pemerintah desa perlu menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi aparat desa tentang pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi.

Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan beberapa variabel lainnya untuk melanjutkan penelitian sejenis. seperti Penelitian Komparatif: Lakukan penelitian komparatif antar desa di berbagai kecamatan atau kabupaten untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes. Studi Longitudinal: Penelitian longitudinal yang memantau perubahan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes selama beberapa tahun dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak kebijakan dan intervensi yang diterapkan. Dan Analisis Faktor Penghambat: Fokuskan penelitian pada faktor-faktor yang menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Andriani, M. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa). Journal of Accounting, Finance, and Auditing, 1 (2), 1-13.

Elvina, K. N. (2023). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi (Issue April).

Fajar Panuluh, G. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

Fitriani, R. D. (2023). Analisis + Pengaruh + Efektivitas, + Transparansi + Dan + Akuntabilitas + p Emerintah + Desa + Terhadap + Pengelolaan + Anggaran + Pendapatan + Da n + Belanja + Desa + Di + Kecamatan + Kartasura.

Fitriyani, L. Y., Marita, M., Windyastuti, W., & Absor, M. (2020). Analisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa. Eksos Lppm, 2 (2), 132-139.

Franklin Alberto Kima. (2025). 1(1), 1–22.

Hilmi, B. (2022). Pengaruh Transparansi , Kompetensi , dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa Terhadap Kinerja Keuangan Desa di Kecamatan Bukit , Kabupaten Bener Meriah. Akuntansi Malikussaleh, 1(3), 348–366.

Hilmi, Birra 2022, Pengaruh Transparansi , Kompetensi , dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa Terhadap Kinerja Keuangan Desa di Kecamatan Bukit , Kabupaten Bener Meriah, 1 (2), 348-366.

Kanzu. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Ingin Jaya) D. Skripsi.

Maina, N., Subarkah, J., & Pravasanti, Y. A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa se- Kecamatan Sambi Boyolali. Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, 1(2), 51–59.

Muh. Wirayuda Hadi Kusuma[1], Mansur Afifi[2], Abdul Manan 2025. Pengaruh akuntabilitas, Transparansi, dan partisipasi Masyarakat Dalam Penglolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBdes) Terhadap Pembangunan Desa di Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, 1 (2), 43-161.

Puspitasari, R. L., Astuti, D. D., & Ningsih, W. F. (2023). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas pemerintah desaterhadap pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(1), 121-134.

Putri, E. H. (2022). Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Seluruh Nagari Di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok) The Effect Of Transparency And Accountability On (Empirical Study of All Nagari in District X Koto Singkarak , Solok Regency). 2(3), 164– 184.

Putri, Ediska Harosa 2022. Penglolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Seluruh Nagari Di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok) The Effect Of Transparency And Acco Untability Untability On (Empirical Study of All Nagari in District X Koto Singkarak , Solok Regency)

Risa Leni Puspitasari, Diana Dwi Astuti, Wiwik Fitria Ningsih 2023. PENGARUHTRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT, EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI DESA TANJUN GREJO KECAMATAN WULUHAN, 1 (1), 123-124

Safitri, I. (2025). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Gampong (Studi Kasus Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar) The Influence of Transparency and Accountability on Village Fund Management (Case Study of Baitussalam District , Aceh Be. 5. https://doi.org/10.47647/jeko.v

Safitri, Ilya 2025. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Gampong (Studi Kasus Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar) The Influence of Transparency and Accountability on Village Fund Management (Case Study of Baitussalam District , Aceh Be

Salasa, N., Bailusy, M. N., & Amiro, S. (2024). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur. 11 (2).

Salasa, Nurfani Bailusy, Muhsin N Amiro, Suratno 2024. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, 2 (2), 540-575.

Saputra, Y., Sekar Sari, M., & Warisi, D. (2024). Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar KabupatenLampung Selatan). Gedong Meneng, 7, 35145. https: // djpb. kemenkeu. go.id

Saputra. (2022). Pengaruh akuntanbilitas , transparansi dan peran perangkat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Juwiring. 2 (2), 86–98.

Wulandari, I. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparani dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Wringin, Kecamatan Wringin/3* Bondowoso. Jurnal Penelitian Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 3(April), 49–58.